



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123  
Surel: humastu.kaltim@bpk.go.id

---

**SIARAN PERS  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TANGGAL 08 Mei 2024**

**Anggota VI BPK Menyerahkan LHP atas LKPD Pemprov Kaltim dan IHPD Tahun 2023**

**Samarinda, 08 Mei 2024** – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPK Kaltim) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E dan Pj Gubernur Kaltim Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kaltim Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA dan para pejabat struktural BPK Kaltim serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kaltim TA 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan empat hal, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menunjukkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program/kegiatan dan pelaporan keuangan Tahun 2023 telah didukung dengan SPI yang efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" atau "WTP".

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltim, yaitu:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Belum Memadai yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
- b. Penetapan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Beasiswa Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan pemberian beasiswa berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak dapat dimanfaatkan oleh calon penerima lainnya; dan
- c. Pelaksanaan dan Pembayaran atas Kegiatan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan realisasi belanja Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang disajikan pada LRA tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan hasil pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

---

*Informasi lebih lanjut:*

*Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123  
Surel: humastu.kaltim@bpk.go.id

---

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opini yang diraih adalah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemprov Kaltim.

Anggota VI BPK RI, mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh Pj. Gubernur Kaltim beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga dimanfaatkan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Selain penyampaian LHP LKPD, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang berisi rangkuman hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltim selama tahun 2023 di wilayah Kaltim. Dalam penyampaian IHPD ini diharapkan Gubernur dan DPRD Provinsi Kaltim dapat memanfaatkan IHPD sebagai acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi Kaltim.

Anggota VI BPK juga berharap pada Tahun 2024 ini, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

Mengakhiri sambutannya, Anggota VI BPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kaltim yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, serta ucapan terima kasih kepada Pemprov Kaltim beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI. (\*)

---

*Informasi lebih lanjut:*

*Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*